

TESIS

**DEKONSTRUKSI AKUNTABILITAS KONVENSIONAL :
SEBUAH KRITIK YANG DIBANGUN DARI
AKUNTABILITAS MASJID**

**DECONSTRUCTION OF CONVENTIONAL
ACCOUNTABILITY: A CRITICISM BUILT
FROM MOSQUE ACCOUNTABILITY**

RIYANTI



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2020**

TESIS

**DEKONSTRUKSI AKUNTABILITAS KONVENSIONAL :
SEBUAH KRITIK YANG DIBANGUN DARI
AKUNTABILITAS MASJID**

**DECONSTRUCTION OF CONVENTIONAL
ACCOUNTABILITY: A CRITICISM BUILT
FROM MOSQUE ACCOUNTABILITY**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**RIYANTI
A062172003**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2020**

TESIS

DEKONSTRUKSI AKUNTABILITAS KONVENSIONAL : SEBUAH KRITIK YANG DIBANGUN DARI AKUNTABILITAS MASJID

disusun dan diajukan oleh

RIYANTI
A062172003

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **14 Agustus 2020**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Penasihat

Ketua

Anggota



Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M. Soc. Sc., CA
NIP. 196703191992032003

Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M. Soc., SC., CA
NIP. 196312101990021001

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M. Soc. Sc., CA
NIP. 196703191992032003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M. Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riyanti
NIM : A062172003
Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul

DEKONSTRUKSI AKUNTABILITAS KONVENSIONAL : SEBUAH KRITIK YANG DIBANGUN DARI AKUNTABILITAS MASJID

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 254 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



NIM. A062172003

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan dan kuhadiahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku

Untuk almarhum bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas nasihat – nasihatmu, sehingga aku bisa memaknai hidup dengan nilai positif, untuk semangat dan kasih sayangmu hingga aku mengerti arti kemandirian. Kalian tidak henti-hentinya membimbing, mendidik, memotivasi serta selalu bersujud memanjatkan doa agar anakmu menjadi orang yang berguna. Semoga karya ini bisa menjadi bukti dan saksi atas kecintaanku kepada kalian meskipun tak akan pernah bisa menyanggupi banyaknya cinta yang kalian torehkan.

Untuk suami dan anakku tercinta, terima kasih telah menghadirkan begitu banyak cinta dalam proses penulisan ini. Terima kasih dan maaf karena telah mengorban waktu yang bisa kita habiskan bersama. Saya cinta kalian.

Adik- adikku tercinta; Rina, Renaldi, dan Adam Pratama, yang meski kadang berselisih paham denganku tetapi telah memberikan semangat luar biasa dan kenangan begitu indah yang tak akan pernah kulupa.

Sahabat - sahabatku yang selalu menemani dalam suka maupun duka, semoga persahabatan kita tak pernah berakhir.

Semua orang yang telah kutemui, yang telah menjadi sumber inspirasiku serta telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada orang- orang baik dan hebat yang telah kutemui.

MOTTO

“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.” (Q.S An-Nisa : 162)

“ Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (Q.S Al-Mujadilah : 11)

“Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia maka haruslah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah dengan ilmu”
(HR. ibn Asakir)

“Jangan tanya kemana perginya ketenangan jiwa, jika tidak meletakkan Allah SWT dalam hati”
(Riyanti)

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi 'alamîn, *alladzi 'alamnâ mâ lam na'lam*. Puji syukur kehadiran Allah, Rabb al Izzati yang telah mengajarkan ke dalam hati manusia apa yang tidak diketahuinya. Salawat dan salam atas nabi Muhammad SAW, semoga jasa besarnya menanamkan spirit baca-tulis dengan asma Allah kepada umat manusia senantiasa mendapat rahmat dari Allah. Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini penulis persembahkan secara khusus serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Suami tercinta Syarifuddin., SE, Ananda terkasih Adeeb Syafiq Syarifuddin, Ayahanda Almarhum Darman dan Ibunda tercinta Ratna atas segala do'a, jasa-jasa, dan segenap kasih sayang yang tak terbatas serta segala bentuk motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di jenjang magister ini.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada dosen pembimbing I Ibu Dr. R. A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.Sc.,CA dan Dosen pembimbing II Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing seorang anak yang dangkal pengetahuan ini, memberi motivasi serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis meskipun ditengah-tengah kesibukan yang ada. Semoga Allah menilai abdi kalian sebagai amal jariah yang amalannya takkan pernah terputus.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada pihak Masjid Jogokariyan dan kepada Informan-Informan dalam penelitian ini, Ustad Agung

Abadi, Pak Enggar, Pak Tejo, dan Pak Haidar yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses pengambilan informasi dalam menjawab pertanyaan penelitian, semoga Allah SWT selalu mencurahkan rezeki-Nya kepada kalian.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis, sungguh kuasa Engkau tiada satupun dapat menandinginya. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan kepada seluruh umatnya.

Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, Ketua Program Studi Magister Sains Akuntansi Ibu Dr. R. A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.Sc.,CA serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman kadir, SE., M.Si. Ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Ibu Dr. R. A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.Sc.,CA dan Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA sebagai tim penasehat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,Ak.,MS.,CA, Bapak Dr. Abdul Hamid Habbe, SE.,M.Si dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si sebagai penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada peneliti.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Salju, SE., MM. (Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo) atas segala bantuannya selama ini, baik berupa ijin studi lanjut maupun bantuan materi dan non materi.

Bapak Hapid, SE., MM sebagai ketua Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palopo, yang telah banyak memberikan saran dan motivasi untuk penyelesaian studi ini, dan ungkapan yang sama serta ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Antong, SE., M.Si dan keluarga atas rekomendasi kepada pihak Universitas Muhammadiyah Palopo sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S2, terima kasih pak, terima kasih banyak.

Terima kasih kepada Ibu Dr. Rismawati, S.E., M.S.A., CSRS., CSRA dan Ibu Dr. Rahmawati, S.E, M.Si, Ak, CA atas bantuannya dalam perbaikan tulisan ini dan bantuan literasi yang telah diberikan. Serta ucapan terima kasih atas motivasi yang diberikan kepada seluruh dosen saya saat S1 dan kakak kakak Staf Universitas Muhammadiyah Palopo.

Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan Magister Akuntansi Angkatan 2017.2 atas motivasi dan kebersamaan hingga akhir studi serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu yang turut memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih pula kepada teman-teman di Kota Palopo dan keluarga besar atas doa dan semangat yang diberikan dalam tahap proses penyelesaian studi ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun peneliti menyadari sepenuhnya tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palopo, 27 Juli 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riyanti', written in a cursive style.

RIYANTI

A062172003

ABSTRAK

RIYANTI. *Dekonstruksi Akuntabilitas Konvensional: Sebuah Kritik yang Dibangun dari Akuntabilitas Masjid* (dibimbing oleh Damayanti. dan Syarifuddin).

Penelitian bertujuan menemukan dan memahami makna akuntabilitas bagi para takmir masjid kemudian mendekonstruksi model akuntabilitas konvensional dan perspektif nilai-nilai Islam yang tertuang pada . akuntabilitas masjid

Jenis peneiman ini adalah kualitatif dengan menggunakan dekonstruksi ala Demda sebagai metode dekonstruksi dan nilai-nilai Islam sebagai alat analisis data. Data diperoleh dengan melakukan . wawancara telepon selama tiga bulan, pengecek dokumen, serta melakukan tinjauan literasi dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas konvensional oleh perusahaan terkhusus organisasi nirlaba masih sarat akan nilai egoistik dan materialistik. Oleh karena itu, logosentris dan akuntabilitas konvensional perlu untuk didekonstruksi. Berdasarkan akuntabilitas temuan yang bebas dan egoistik dan materialistik dapat terwujud dengan konsep akuntabilitas masjid yang dibangun dari perspektif nilai-nilai Islam. Hasil temuan menunjukkan bahwa nilai amanah dan spiritual menjadi pondasi bagi para takmir dalam bertanggung jawab baik secara horizontal maupun vertikal.

Kata kunci: Akuntabilitas, Konvensional, Akuntabilitas Masjid, Pertanggungjawaban, Amanah.



ABSTRACT

RIYANTI. *Deconstruction of Conventional Accountability: A Criticism Built from Mosque Accountability*, (supervised by **Damayantif**, and **Syarifuddin**)

This study aims to determine the meaning of accountability for the takmir of the mosque and then deconstruct the conventional accountability model from the perspective of Islamic values contained in the accountability of the mosque.

This research is a type of qualitative research using Derrida-style deconstruction as a method of deconstruction and Islamic values as a data analysis tool. Data obtained by conducting telephone interviews for three months, checking documents, and doing literacy reviews from various sources.

The results show that conventional accountability practices by companies specifically nonprofit organizations are still full of egoistic and materialistic values. Therefore, the logocentrism of conventional accountability needs to be deconstructed. Based on research findings, accountability that is free from egoistic and materialistic can be realized with the concept of mosque accountability which is built from the perspective of Islamic values. The findings also show the trust and spiritual values become the foundation for takmir in taking responsibility both horizontally and vertically.

Keywords: Conventional Accountability, Mosque Accountability, Accountability, Trusteeship, Spiritual



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian Penelitian	iv
Persembahan.....	v
Motto.....	vi
Prakata	vii
Abstrak	xi
Abstract	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	24
1.3 Tujuan Penelitian	24
1.4 Manfaat Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1 Suatu Tinjauan Literasi tentang Dekonstruksi.....	28
2.2 Telaah tentang Nilai-Nilai Islam	31
2.3 Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Rancangan Penelitian: Dekonstruksi Derrida	44
3.2 Instrumen, Situs, dan Informan Penelitian	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data	53
3.4 Teknik Analisis Data: Nilai-nilai Islam	56
3.5 Rencana Pengujian Keabsahan Data	60
BAB IV LORONG-LORONG GELAP DAN SECERCAH HARAPAN MENUJU SITUS PENELITIAN.....	62
4.1 Pra Penelitian: Proses Menemukan Fenomena.....	62
4.2 Mengenal Masjid Jogokariyan	63
4.3 Pandemi COVID 19: Hadir Tanpa Diundang	67
4.4 Wawancara Tanpa Bertatap: Jauh Dimata Dekat dalam Suara	69
BAB V IRONI AKUNTABILITAS KONVENSIONAL: KETIKA EGOISTIK DAN METRIALISTIK MENJADI LOGOS.....	74
5.1 Akuntabilitas Konvensioanl: Sarat Nilai Egoistik dan Materialistik	74
5.2 Akuntabilitas Konvensioanl: Sisi Kelam Akuntansi Mainstream	84

BAB VI MENUJU AKUNTABILITAS MASJID: REFLEKSI NILAI AMANAH DAN SPIRITUALIS	90
6.1 Menemukan Makna Akuntabilitas pada Masjid Jogokariyan	90
6.2 Amanah: Sandaran Utama Para Takmir Masjid Jogokariyan	96
6.3 Gerakan Sisa Infak Nol Rupiah: Saldo Nol untuk Kemaslahatan Umat	103
6.4 Spiritual: Refleksi Takwa yang Melampaui Hitungan Materialistik Matematis	108
BAB VII TAZKIYATUN NAFS: KONSTRUKSI AKUNTABILITAS MASJID....	114
7.1 Nilai-nilai Pada Praktik Akuntabilitas Para Takmir Masjid Jogokariyan	114
7.2 Menuju Akuntabilitas Masjid	118
BAB VII PENUTUP	133
8.1 Simpulan	133
8.2 Implikasi	134
8.3 Keterbatasan Penelitian	135
8.4 Saran	136
Daftar Pustaka	137

DAFTAR TABEL

6.1	Metafora-Metafora yang Mengintegrasikan Makna dan Penerapan Akuntabilitas	91
6.2	Hasil Triangulasi Sumber Data	93
7.1	Wujud Nilai pada Praktik Akuntabilitas Para Takmir Masjid Jogokariyan .	115
7.2	Akuntabilitas Masjid <i>vis a vis</i> Akuntabilitas Konvensional	128

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Kerangka Pikir	43
7.1 Konsep Akuntabilitas Masjid	123

BAB I

PENDAHULUAN

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Q.S An-Nisa ayat 58

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai penelitian telah menunjukkan keterbatasan akuntansi konvensional (Reheul, dkk. 2014; Vermeer, dkk. 2009). Hal ini ditunjukkan dari banyaknya skandal akuntansi dan manipulasi laporan keuangan yang melanda perusahaan serta rendahnya kepedulian mereka akan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Sulistiyono, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi telah gagal untuk menggambarkan realitas bisnis secara utuh. Triyuwono (2006) menyatakan bahwa akuntansi konvensional tidak mampu merefleksikan realitas non ekonomi yang diciptakan perusahaan. Ia hanya mampu mengakui dan merefleksikan peristiwa ekonomi saja. Hal ini selaras dengan pernyataan Prasetio (2017) bahwa di dalam akuntansi konvensional (*mainstream accounting*), pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders* dan *bondholders* sedangkan pihak yang lain sering diabaikan.

Sitorus (2015) memaparkan bahwa dasar dari akuntansi merupakan cerminan dari kondisi masyarakat suatu wilayah. Jika masyarakat memiliki budaya yang bercorak dengan unsur kapitalisme, maka dengan sendirinya akuntansi akan bersifat kapitalisme pula. Hasan dan Mahyudi (2020) menyatakan bahwa Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi

bercirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi dan pendayagunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Menurutnya, kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk pengendalian perekonomian dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa, yang seolah-olah, individu didorong dengan “Tangan Tak Terlihat” (*The Invisible Hand*) yang mendorong mereka untuk maju.

Tidak terbantahkan bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi secara individual. Kendati demikian, orientasi individu merupakan tahap awal bagi kepentingan publik atau sosial. Dengan kata lain, sebuah sistem pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan publik. Konsep kapitalisme beranggapan bahwa di dalam metodenya ada desiminasi pemasukan dan pembagian harta yang menyeluruh dan *faire*, tetapi sistem tersebut tanpa disertai penyeleksi, serta pemenuhan kemauan tidak pada tempatnya, pemasokan yang pada akhirnya menjadi tak terdistribusikan secara menyeluruh. Sistem kapitalisme yang ada sampai era sekarang ialah konsep kapitalisme yang sudah berubah bentuk (Zakiyuddin, 2007). Maka dari faktor tersebut, konsep kapitalisme bias dikatakan sebagai sebuah pemikiran cemerlang dikarenakan masih bias membenahi dirinya untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan premis yang telah dilakukannya sendiri (Hasan dan Mahyudi, 2020).

Kapitalisme mengajarkan kita untuk taat, patuh, dan tunduk pada nilai-nilai kombinasi dari egoistik dan materialistik yang kemudian menyatu dalam perekat utilitarianisme (Triuwono, 2012). Firdaus, dkk (2016) menyitir pendapat (Bashir, 1986; Dhaouai, 1993; Ragab; 1993, dan Bakar, 1994), sudah menjadi isu lama

bahwa dalam dunia pendidikan akuntansi, pemahaman akan akuntansi harus disajikan dengan cara berpikir kapitalisme dan liberalisme yang merupakan wujud dari modernisme yang berciri reduksionis, mekanis, linier, dikotomis, dan materialistik.

Kamayanti (2012) dalam percakapan dialogis dengan mahasiswa juga mengatakan bahwa akuntansi saat ini sudah jauh dari nilai-nilai etis bangsa Indonesia. Pengadopsian akuntansi yang berdasarkan dengan unsur kapitalisme sangat menekankan pada unsur pemeliharaan kekuasaan. Harahap (2013) menggambarkan akuntansi ala kapitalisme sebagai alat untuk mengumpulkan harta dan memeliharanya agar proses akumulasi kekayaan berjalan lancar dan penguasaannya tetap di tangan kapitalis. Implikasinya, manusia terjebak dalam kuasa yang utilitarian-hedonis karena perhatian yang besar pada aspek materi dalam kapitalisme akuntansi (Triyuwono, 2012). Tidak ada unsur Ketuhanan dan hal-hal yang bersifat humanis dalam definisi tersebut. Hal ini sekaligus menggambarkan akuntansi hanyalah sebagai bahasa bisnis sehingga segala pemikiran tentang prinsi-prinsip di dalamnya hanya berfokus pada unsur materi. Akibatnya, akuntansi penuh dengan unsur-unsur yang bersifat rasional demi pengembangan bisnis semata.

Secara sistematis, Triyuwono (2006) menjelaskan beberapa kelemahan yang muncul berkaitan dengan praktik akuntansi konvensional yakni : 1) Akuntansi konvensional mengabaikan dua aspek penting yaitu lingkungan dan sosial sehingga gagal menggambarkan realitas bisnis yang semakin kompleks. 2) Sifat egoisme sangat melekat pada akuntansi konvensional sehingga terefleksi ke dalam bentuk *private costs/benefits* dan berorientasi melaporkan *profit* untuk kepentingan pemilik modal/pemegang saham. Oleh karena itu,

informasi akuntansi menjadi egois dan mengabaikan pihak lain. 3) Akuntansi konvensional lebih bersifat materialistik sehingga memarjinalkan nilai-nilai spiritualitas padahal manusia sebagai pelaku akuntansi memiliki dua hal tersebut yakni material dan spiritual. Jika manusia diarahkan untuk menjalankan praktik akuntansi yang berorientasi pada materi (*profit*) maka perilaku yang muncul berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut berpotensi melanggar aturan dan kehilangan nilai-nilai etika, agama dan moralitas.

Dapat dilihat bahwa titik penting dalam laporan keuangan adalah informasi yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai. Selain faktor informasi, faktor "sejumlah besar pemakai" (*public interest*) juga menjadi fokus akuntansi, khususnya akuntan, dalam praktiknya (Mulya dan Utami, 2018). Baker (2004) menjelaskan bahwa kepentingan bisnis dan perusahaan di Amerika, termasuk kepemimpinan dalam profesi akuntan publik, cenderung mendukung ideologi neo-liberal dengan perspektif liberal atas sosial-demokratis atau melalui perspektif kritis atas sosial-demokratis. Namun demikian, ideologi neo-liberal, menurut Baker (2004) tidaklah cocok digunakan dalam bidang akuntansi.

Mulawarman (2014) menyatakan liberalisme sebagai *datum* (*value*, ideologi, konsep) utama Kapitalisme Barat telah "memerangkap" akuntansi dalam kesewenang-wenangan dan kegilaan (*madness*) penguasa kapital (*capital*) melalui perusahaan untuk selalu menjadi alatnya yang paling efektif dan efisien. Liberalisme memiliki tiga unsur utama, yaitu keutamaan pada milik pribadi, pencarian dan maksimasi keuntungan, serta kompetisi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Untuk mewujudkan tiga unsur utama liberalisme itulah, diperlukan motor penggerak berupa sistem kapitalisme agar dapat dilakukan akumulasi kapital bagi kepentingan pribadi, dalam akuntansi disebut sebagai

owner/ pemilik, pemegang saham, investor maupun kreditor. Jadi, jelas sekali *core datum* akuntansi konvensional adalah Kapitalisme berbasis Liberalisme. Sekarang, berevolusi menjadi Neoliberalisme (Mulawarman, 2010). Lebih lanjut, Rizky dan Majidi (2008: 233) menyatakan liberalisme ini saat ini telah disempurnakan menjadi neoliberalisme yang menekankan perlunya campur tangan negara dalam pembentukan harga pasar. Namun campur tangan pemerintah ini harus dilakukan melalui penerbitan peraturan perundangan sehingga mekanisme pasar bisa segera terbentuk secara operasional dan tidak terintangi oleh faktor-faktor kelembagaan.

Akuntansi memang didesain sebagai “perangkap hegemoni korporasi” (Mayper et al. 2005) dan “alat” neoliberalisme ekonomi untuk melanggengkan kepentingan korporasi (Merino et al. 2005) melalui *manufactured consent*. *Manufactured consent* merupakan cara paling efektif dalam mengarahkan kekuasaan dan justifikasi ideologis melalui deregulasi untuk mendistribusikan *wealth* dan *security* secara global berbentuk penguatan pasar yang bebas dari intervensi regulasi.

Ujung kepentingan korporasi adalah profit sebagai ideologi neoliberal paling utama yang harus masuk dalam deregulasi tersebut, melalui internasionalisasi akuntansi bernama IFRS (*International Financial Reporting Standards*) berbentuk IAS (*International Accounting Standards*) yang didesain oleh IASB (*International Accounting Standards Board*). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Gray (2006) yang menunjukkan bahwa “...*conventional financial reporting and for the superficial and cosmetic adjustments to that reporting through “new models of organisational reporting”*”. Laporan keuangan yang didesain hanya menggambarkan kapital semata bahkan dalam hasil penelitian

Gray (2006) menyatakan bahwa pelaporan sosial dan lingkungan yang substansial menunjukkan bahwa kapitalisme keuangan internasional modern dan organ utama yang mendukungnya pada dasarnya dirancang untuk memaksimalkan kerusakan lingkungan dan mengikis keadilan sosial yang realistik.

Hal ini menggambarkan bahwa nilai kapitalisme dalam akuntansi konvensional tidak hanya berevolusi menjadi neoliberalisme tetapi juga memasuki akuntansi sosial. Bagi perusahaan, tujuan dari akuntansi sosial hanya untuk mendapatkan legitimasi agar dapat bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya. Eksploitasi sumber-sumber alam serta masyarakat (sosial) tanpa batas untuk kemajuan perusahaan atau korporasi yang pada akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan alampun terjadi akibat peran kapital yang terlalu mendominasi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Wicaksono dan Kholid (2019) yang menunjukkan bahwa Tujuan utama *social reporting* adalah untuk mengonfirmasi isu-isu negatif dan mempertahankan legitimasi serta reputasi. Selain itu, *social reporting* diketahui tidak secara signifikan ditujukan untuk melindungi kelangsungan alam. Lebih lanjut, Lehman (2001) memaparkan bahwa akuntansi sosial yang signifikan menjadi komponen penting, tetapi belum terpenuhi dalam interaksi masyarakat bisnis.

Bukan hanya untuk kepentingan korporasi saja, akuntansi juga ternyata digunakan oleh pemerintah melakukan desain masyarakatnya. Kepentingan negara mendesain masyarakatnya dan bekerja sama dengan korporasi, melakukan hegemoni regulasi tidak hanya pada internasionalisasi standar akuntansi di areal bisnis, tetapi juga di areal negara lewat apa yang ramai saat ini digaungkan, yaitu *New Public Management* (NPM). Dengan koridor NPM

maka segala bentuk kebijakan publik harus diorientasikan pada mekanisme pasar bebas, privatisasi perusahaan publik milik negara dan daerah, termasuk kebijakan otonomi daerah berbasis manajemen model swasta (Mulawarman, 2014).

Hasil penelitian Amelia (2018) memaparkan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh PT. Freeport telah bergulir sebelum tahun 2000. Tetapi, hasil pencemaran tersebut baru dirilis oleh Walhi pada tahun 2006. Pencemaran masih berlangsung diperkuat oleh temuan tim audit BPK tahun 2013 serta hasil evaluasi program pengelolaan lingkungan oleh Kementerian Lingkungan tahun 2015 - 2016. Kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Freeport telah bergulir sejak tahun 2000 dimana telah terjadi pendangkalan sungai serta tanah longsor yang memakan korban jiwa disekitar tambang. Kemudian tahun 2006 LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) merilis laporan tentang dampak pertambangan PT. Freeport berdasarkan sejumlah laporan pemantauan oleh pemerintah dan perusahaan yang tidak dipublikasikan untuk umum. Laporan tersebut memaparkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh PT. Freeport di udara, air, kerusakan lingkungan, serta menyalahi ketentuan Amdal diluar wilayah yang telah diatur.

PT. Freeport telah mencemari lingkungan akibat limbah sisa pertambangan, air sungai, pengendapan sedimen, kandungan limbah logam dan berbahaya, serta penggunaan hutan lindung berdasarkan data yang dirilis oleh LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) serta Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan tersebut membuang *tailing* dengan kategori limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) melalui Sungai Ajkwa. Limbah ini telah mencapai pesisir laut Arafura. *Tailing* yang dibuang PT. Freeport ke Sungai

Ajkwa melampaui baku mutu *total suspend solid* (TSS) yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Limbah *tailing* PT. Freeport juga telah mencemari perairan di muara Sungai Ajkwa dan mengontaminasi sejumlah besar jenis mahluk hidup serta mengancam perairan dengan air asam tambang berjumlah besar. Dari hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh Parametrix terungkap bahwa *tailing* yang dibuang PT. Freeport merupakan bahan yang mampu menghasilkan cairan asam berbahaya bagi kehidupan akuatik (Amelia, 2018). Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Azaria (2019) yang menyatakan bahwa "*Other problems that always arise in Freeport's activities such as human rights, environmental damage, and so on, are increasing*". Kini kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya dari segi lingkungan tetapi juga menimbulkan permasalahan HAM dan sebagainya.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh Djhaut (2017) di Kalimantan dan Sumatera. Tindakan kooptasi perusahaan kelapa sawit dan industri kertas di kedua wilayah itu telah membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup. Untuk meningkatkan efisiensi, kerap kali perusahaan membakar hutan dan lahan sebagai cara untuk membersihkan lahan yang kemudian ditanami kelapa sawit. Lebih dari dua juta hutan dan lahan gambut telah terbakar dan diduga menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup besar bagi perubahan iklim global. Asap yang ditimbulkan dari pembakaran hutan oleh perusahaan juga berdampak negatif bagi kesehatan manusia.

Penelitian Rasyadian (2013) berupaya untuk membahas bagaimana neoliberalisme telah masuk ke dalam sendi-sendi perekonomian pedesaan. Penelitian ini dilakukan di desa Sarimukti, kecamatan Pasirwangi, kabupaten Garut, provinsi Jawa Barat. Di desa ini digambarkan bagaimana tangan-tangan

'privatisasi' datang dengan membabi buta, dengan tengkulak sebagai aktor sentralnya.

Penelitian Amri (2011) menunjukkan dampak kerusakan lingkungan oleh hadirnya perusahaan multinasional (*Multinational Corporate/MNC*) pada kasus China dan Papua Nugini. Di China, aktivitas perusahaan multinasional pertambangan telah mengakibatkan rusaknya hutan, tercemarnya sungai-sungai, tanah, dan udara yang kemudian mengakibatkan penyakit pernapasan dan pencernaan, dan juga mengurangi ketersediaan pangan masyarakat lokal. Selain itu dilaporkan bahwa telah terjadi konflik sosial di daerah sekitar perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Hal serupa juga terjadi di Papua Nugini. Aktivitas pertambangan telah mencemari tanah dan air tempat dimana penduduk lokal menggantungkan hidupnya. Lebih jauh, kehadiran perusahaan tambang tersebut mengancam ketahanan pangan penduduk dan menyulut konflik antarsesama penduduk lokal di sana.

Tidak berhenti sampai disitu, Hasugian (2020) yang dilansir dari media online *Tempo.co* memberitakan dampak dari perusahaan multinasional yang juga dirasakan oleh masyarakat khususnya nelayan di Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan. Pengerukan pasir yang dilakukan oleh PT Royal Boskalis sekarang ini membuat nelayan merasa resah, karena setiap nelayan keluar mencari ikan selalu tidak membuahkan hasil karena airnya keruh. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin menyatakan proyek ini berdampak pada nelayan sekitar. Nelayan hingga organisasi lingkungan hidup telah meminta Pelindo IV menghentikan proyek tersebut dengan aksi penolakan. Dari aksi penolakan tersebut, sebanyak 7 nelayan dari pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi

setelah melakukan aksi menolak penambangan pasir laut di daerah Copong, tempat mereka biasa mencari ikan. Lembaga Bantuan Hukum Makassar menyebut penangkapan ini disertai kekerasan.

Perusahaan multinasional sudah mulai agresif melancarkan kegiatan ekonominya yang lintas batas wilayah sejak dekade 1970-an. Perusahaan multinasional ini kemudian dikenal dengan dua ciri: ekspansif dan eksploitatif Amri (2011). Dua ciri ini sekaligus mengindikasikan abainya perusahaan tersebut atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Hal ini diperkuat oleh Marshall (1999) yang mengatakan bahwa era globalisasi dipengaruhi secara kuat oleh motif-motif ekonomi para agen kapitalis global. Agen kapitalis global ini dimotori oleh perusahaan multinasional yang hadir setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2.

Sifat-sifat inheren dalam akuntansi modern yang kini dianut oleh Indonesia adalah anthropocentric, sarat pemusatan politik kepentingan, berjiwa neoliberalisme, dan secular (Mulawarman 2013). Hutasoit dan Mulya (2019) menyatakan akuntansi juga mengusung nilai egoisme, utilitarianisme, orientasi internalitas (tidak mengakui *public costs*), dan berorientasi angka semata (logocentrisme). Sedangkan Sitorus (2015) juga mengatakan bahwa akuntansi modern tidak mengenal unsur Ketuhanan, berorientasi angka, fokus kepada bisnis semata, materialistik, individualistik, dan hedonis. Firdaus, Sari dan Kamayanti (2016) juga mengkritisi sifat maskulinitas akuntansi modern. Sifat maskulin telah mampu membuat manusia meminggirkan unsur sosial dan unsur lingkungan sekaligus nilai-nilai transcendental atau nilai-nilai spiritual.

Triwuyono (2006) kembali menyatakan bahwa salah satu kelemahan mendasar akuntansi konvensional terletak pada sifatnya yang egoistik dan

materialistik. Dengan orientasi memaksimalkan *profit* untuk kepentingan pemegang saham atau manajemen maka perusahaan akan melakukan eksploitasi terhadap orang lain dan lingkungan alam sehingga mereka mengabaikan proses rehabilitasi untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut karena dipandang akan mengeluarkan banyak biaya sehingga dapat memperkecil laba (*profit*). Akuntansi hanya memberikan perhatiannya pada dunia materi yang akhirnya juga direduksi menjadi uang. Artinya, akuntansi konvensional hanya menangkap dan melaporkan transaksi-transaksi yang melibatkan uang, di luar itu dianggap bukan merupakan wilayah akuntansi.

Sifat egoistik pada akuntansi juga telah merasuki akuntansi sosial dan lingkungan melalui legitimasi. Legitimasi dianggap sebagai cara untuk mempertahankan keberlangsungan hidup suatu organisasi yang dicapai melalui tindakan organisasi yang sesuai aturan dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat (O'Donovan 2002). Suchman (1995) menggunakan *legitimacy theory* yang dirumuskan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) mengatakan bahwa hadirnya perusahaan karena adanya legitimasi masyarakat, sehingga hal yang paling penting dilakukan oleh perusahaan adalah mengikuti aturan, norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat untuk mempertahankan legitimasinya. Namun, perusahaan memiliki kecenderungan untuk menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan hanya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atas aktivitas perusahaan yang dilakukan (Ghozali dan Chariri 2007) dan bukan sebagai bentuk kesadaran atas tanggung jawabnya terhadap masyarakat atas aktivitas perusahaan yang dilakukan. Lebih lanjut, Freeman (1994) dan menyatakan bahwa bisnis itu perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang mempengaruhi perusahaan.

Sifat egoistik dan materialistik diekspresikan dengan jelas oleh Triyuwono (2006) pada laporan keuangan (*financial statement*). Contoh sederhana adalah laporan laba-rugi (*income statement*) yang menyajikan besarnya laba atau rugi perusahaan. Laporan ini menunjukkan akomodasi akuntansi konvensional terhadap kepentingan (ego) *shareholders* untuk mendapatkan informasi besarnya laba yang menjadi haknya dan laba materi yang terukur dengan jelas dengan menggunakan unit moneter. Akuntansi konvensional melahirkan produk akuntabilitas yang juga sarat akan nilai egoistik dan materialistik yang menjadi logos dalam akuntabilitas.

Menurut teori kritis, akuntansi harus didasarkan pada prinsip demokrasi dan akuntabilitas (Gray, dkk. 1996). Artinya, organisasi harus menyediakan akuntabilitas tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga untuk berbagai pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh kegiatan organisasi (Gray, dkk. 1996). Friedman (1970) menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada *shareholder* namun juga kepada *stakeholder* karena tanggung jawab perusahaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan namun juga kesejahteraan sosial. Gray, dkk (2010) menyatakan “...*the organization owes a duty of accountability to all stakeholders but it offers little descriptive or explanatory power to CER (Corporate Environmental Reporting)*”. Selain itu, akuntabilitas berbagai pemangku kepentingan harus melampaui orientasi keuangan dan mencakup dampak sosial juga. Hal ini merupakan dasar untuk membuat organisasi menjadi lebih akuntabel (Andreus dan Costa, 2014).

Mashaw (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan konsep mengenai perilaku untuk mengawasi pihak lain, untuk menilai apakah mereka

telah memenuhi tanggung jawab mereka, dan untuk menerapkan sanksi jika mereka ini belum memenuhi tanggung jawab. Kewajiban untuk memberikan laporan kepada orang lain, untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana berbagai sumber daya telah digunakan dan apa dampaknya (Trow, 1996).

Roberts dan Scapens (1985) yang dikutip oleh Purnomosidi, dkk (2012) menggambarkan akuntabilitas sebagai suatu hubungan yang mencakup pemberian dan permintaan tanggung jawab atas suatu tindakan tertentu. Secara sederhana, akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Gray, dkk (1996) mengatakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat yang disebut akuntabilitas. Pada sisi lain akuntabilitas merupakan hak dan kewajiban organisasi Lehman (2005), namun dalam praktiknya di *Non Government Organization* (NGO) masih sangat lemah (Fries, 2003 dan Brown & Moore, 2001) dikutip oleh Prasetio (2017). Meskipun konsep akuntabilitas telah banyak dibahas dalam literature akademik, hal itu tetap menjadi konsep yang rumit dan beragam, terutama dengan mengacu pada organisasi nirlaba (Gray, dkk. 2006). Akuntabilitas organisasi nirlaba tidak bisa semata-mata berdasarkan kinerja ekonomi dan keuangan karena informasi ini bisa menyesatkan. Akuntabilitas organisasi nirlaba harus mempertimbangkan hubungan dengan para pemangku kepentingan dan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, yang secara definisi tidak hanya keuangan tetapi juga relevan dengan dimensi sosial dari kehidupan masyarakat.

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan Amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Muddasir: 38:

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S.: Al-Muddasir: 38).46*

Kemudian diperkuat dalam firman Allah Q.S An Nisa': 58:

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". Q.S An-Nisa ayat 58*

Menurut Kholmi (2012) ayat di atas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu; *Pertama*, memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia. *Kedua*, memberikan keputusan hukum antara manusia dengan adil atau menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu menurut pandangan Kholmi (2012) konsep akuntabilitas mempunyai tiga dimensi yaitu: hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini Allah sebagai pemberi amanah merupakan pusat tertinggi, dan manusia mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat manusia maupun alam dalam pengelolaan bumi ini semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan.

Mahlel, dkk (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat (*stakeholders*) dalam tataran horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah SWT. Islam Memiliki pandangan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat.

Praktik akuntabilitas ini telah lama dipraktekan bahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saati itu penerimaan negara meningkat secara signifikan. Dengan demikian, kekayaan negara yang disimpan juga semakin besar. Para sahabat mengusulkan perlunya dilakukan pencatatan sebagai upaya pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan unit khusus bernama *diwān* yang bertugas membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas sang Khalifah atas dana *bait al-māl* yang menjadi tanggungjawabnya (Lubis, 2015).

Menurut Abu Tapanjeh (2009) indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif islam adalah 1) Segala Aktifitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah. 2) Aktifitas organisasi dilaksanakan dengan adil. 3) Aktifitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal

(Endahwati, 2014). Pada dasarnya manajemen hanya menggunakan instrumen akuntabilitas horizontal yaitu pertanggung jawaban kepada *stakeholder* dan alam, sedangkan akuntabilitas vertikal yaitu pertanggung jawaban kepada Tuhan yang menjadi premis utama dalam akuntabilitas masih belum sepenuhnya digunakan.

Dalam praktiknya, akuntabilitas konvensional telah menghilangkan makna sesungguhnya sebagai manifestasi pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah. Konsep akuntabilitas dalam dunia kapitalisme telah sarat dimasuki nilai-nilai rasionalitas. Dunia kapitalisme mengalami krisis manajemen karena setiap hari terdapat skandal perusahaan, di mana para pemimpin mengkhianati rakyat mereka sendiri dan berusaha untuk mencari keuntungan duniawi. CEO melakukan langkah-langkah untuk mencapai target maksimisasi keuntungan serta memuaskan para pemegang saham. CEO telah melupakan hubungan manusia dan sosial, yang memperoleh kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan (Ahmed, 2012).

Krisis manajemen terjadi di perusahaan, di mana manajemen mengkhianati pegawai dan berusaha untuk mencari keuntungan duniawi. Mereka hanya peduli tentang kepuasan pemegang saham dan melupakan kewajiban moral dan etika lainnya untuk organisasi, ummah, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menyebabkan sistem kapitalistik yang sarat akan nilai materialistik dan egoistik hidup dan berkembang biak pada akuntabilitas konvensional. Jika konsep akuntabilitas kapitalis ini diterapkan pada lingkungan masyarakat yang berbeda secara filosofis dan konseptual maka akan muncul inkonsistensi nilai yang akhirnya akan menimbulkan inkonsistensi persepsi dan perilaku. Artinya, akuntabilitas konvensional tidak dapat menyelesaikan masalah sosial yang

muncul dalam praktik akuntabilitas seperti penerapan yang asing dari nilai-nilai Islam dengan menjadikan materi sebagai pusat kepentingan sehingga hanya mengabdikan kepada para pemilik modal saja.

Akuntabilitas konvensional pada organisasi *non profit* hingga saat ini masih didominasi oleh rasionalisasi hubungan *principal-agent* yang memperlihatkan bahwa *agent* sebagai pihak ketiga diberi wewenang oleh *principal* untuk mengelola organisasi dan berpihak pada kepentingan *principal* (Ebrahim, 2003). Hubungan *principal-agent* timbul karena adanya pemisahan antara pemilik modal (*principal*) dan pengelolaan modal (*agent*). Pemisahan ini memicu adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, hal ini disebabkan karena sejatinya manusia memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi (*egois*). Berbeda dengan yang ada di korporasi, kesalahan dalam pengelolaan dana donasi, tidak menimbulkan *complain* dari donator terhadap *agent* organisasi *non profit* termasuk didalamnya adalah organisasi masjid.

Salah satu *concern* persoalan akuntabilitas konvensional adalah dari mana hal ini diturunkan yang tentu saja pada akhirnya memiliki konsekuensi terhadap peradaban karena ketika sebuah praktik langgeng, maka terbentuklah diskursus-diskursus akuntansi dan pada akhirnya membentuk realitas pula. Materialisme sudah merupakan "gen" *economic rationality* (Lehman 2005). *Economic rationality* lebih menekankan pada sisi materialism serta keuntungan yang berasal dari *western materialist phylosophy*. Ciri dari filsafat materialisme ini adalah penekanan pada sisi material, begitu pula halnya pada *economic rationality* yang memiliki sifat yang demikian. Sisi persaingan, egoisme serta rasionalisme yang berlebihan merupakan sisi *economic rationality*, (Kusdewanti,

dkk. 2016). Implikasi nilai pada akhirnya masuk pada tataran realitas praktik, termasuk akuntabilitas konvensional.

Pemecahan atas masalah di atas adalah sebuah keniscayaan ketika nilai-nilai Islam benar-benar menjadi sebuah paradigma dalam penerapan konsep akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki tujuan ekonomi dan sosial, namun menurut nilai-nilai Islam akuntabilitas memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan ekonomi, politik, keagamaan dan sosial (Presetio, 2017). Artinya akuntabilitas menurut hukum ilahi Islam adalah cara untuk sumber kehidupan yang dalam pengertian teknis merujuk kepada sistem hukum sesuai dengan Al Qur'an dan hadist. Al-Qur'an dan sunah mendefinisikan dengan jelas apa yang benar, jujur dan adil, apa yang menjadi preferensi prioritas masyarakat, apa peran dan tanggung jawab perusahaan, dan juga, dalam beberapa aspek, menguraikan standar akuntansi khusus untuk praktik akuntansi seperti akuntabilitas.

Islam hadir dengan ajaran yang menjanjikan kemashlahatan dunia dan akhirat. Ajarannya mencakup semua tuntunan luhur bagi kehidupan manusia di muka bumi dalam semua bidang kehidupan. Tujuan Islam tidak lain agar manusia selamat dan bahagia dalam kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kepercayaan atas Islam bahwasannya Islam menjanjikan harapan hidup yang lebih baik kepada semua manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, dan gender. Islam adalah sistem nilai, tata cara, dan praktek hidup (Syahra, dkk., 2014). Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Nilai-nilai ini memasuki semua aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya, ilmu akuntansi juga termasuk didalamnya.

Armadayanti (2017) menyebutkan akuntabilitas sebagai kewajiban dari

individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban kepada Tuhan berkaitan dengan sifat amanah. Amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh insan kehidupan, amanah juga merupakan pengajaran tertinggi di dalam Islam.

Amanah dalam konteks praktek akuntansi, diinterpretasikan sebagai akuntabilitas, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang amanah harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, pelaksana, masyarakat dan Tuhan. Hal ini selaras dengan pernyataan Mulawarman (2010), akuntansi profesional yang seutuhnya adalah mereka yang mampu mengembangkan gagasan, teori, konsep, maupun aplikasi akuntansi sesuai dengan realitas dan tetap berorientasi pada empati akuntabilitas pada *stakeholder, shareholder, creditor, social*, dan lingkungan yang berujung pada ketundukan Ilahi.

Di dalam syariah Islam mengharuskan manusia (perusahaan) dalam menyebarkan rahmat (*asset*) tidak boleh hanya berfokus pada pihak-pihak yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada penciptaan kekayaan tersebut, (Wulandari, 2010). Penyebaran rahmat (*asset*) tersebut tentu saja harus dilakukan dengan disertai nilai keadilan berdasarkan potensi internal (akal dan hati nurani). Tidak hanya itu saja, pendistribusian rahmat ini diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan mampu melakukan suatu perubahan ke kondisi yang lebih baik lagi bagi seluruh umat (*stakeholders*), alam dan lingkungan yang berujung pada ketundukan Ilahi.

Penerapan nilai-nilai Islam ini dapat kita temui pada akuntabilitas masjid. Hasil penelitian Siskawati, dkk (2016) yang bertujuan untuk menggali praktik

akuntabilitas pada masjid menemukan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama yang dipegang teguh oleh pengurus dalam menjalankan kegiatan dan program-program masjid. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pengurus masjid selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang ada pada dirinya.

. Islam hadir dengan ajaran yang menjanjikan kemashlahatan dunia dan akhirat.. Artinya, akuntabilitas konvensional yang berlaku dengan sistem kapitalis yang sarat akan nilai egoistik dan materialistik akan mengalami penyucian jiwa jika nilai-nilai Islam diterapkan dalam akuntabilitas. Dengan demikian, dekonstruksi ala Derrida telah menjadi salah satu solusi untuk meruntuhkan struktur mapan yang menyengsarakan (Rusbiantoro, 2001: 23).

Adapun pengertian dari dekonstruksi menurut Triyuwono (2012:139) adalah upaya menghadirkan aspek-aspek lain yang berada di luar narasi besar (logosentrisme, dalam hal ini pemikiran sistem ekonomi dan akuntansi modern). Akuntansi digambarkan oleh Triyuwono (2006) bahwa posmodernisme sebagai alat untuk melakukan dekonstruksi pengetahuan akuntansi yang sarat nilai modernisme yang memperangkap lokalitas dan agama dalam konteks harmonisasinya dengan akuntansi yang tunggal. Akuntansi sebenarnya bukanlah produk yang memiliki kesamaan secara sosiologis, kultural bahkan filosofis. Triyuwono (2000) bahkan membuktikan bahwa ternyata akuntansi tidaklah tunggal.

Sarup (2008:74) menggambarkan dekonstruksi sebagai upaya untuk menemukan teks marginal yang menjanjikan, menyingkap, membongkar momen yang tidak dapat dipastikan dengan alat penanda yang positif, membalikkan hierarki yang ada, agar dapat diganti; membongkar agar dapat membangun

kembali apa yang selalu telah tertulis. Hal ini juga senada dengan pernyataan O'Donnell (2009:63) yang berpendapat bahwa dekonstruksi membuka tabir kemungkinan makna yang begitu banyak, agenda terselubung dan aspek yang tidak disadari dari teks. Dengan demikian dekonstruksi digunakan sebagai strategi baru untuk memeriksa sejauh mana struktur-struktur yang terbentuk dan senantiasa dimapankan batas-batasnya serta ditunggalkan pengertiannya.

Melihat pengertian dekonstruksi di atas, dapat diambil suatu makna bahwa penulis tidak menghilangkan makna bangunan lama yang sudah ada. Dalam hal ini penulis tidak meniadakan makna akuntabilitas konvensional yang sarat akan nilai egoistik dan materialistik, namun memunculkan makna akuntabilitas dengan perspektif nilai-nilai Islam yaitu amanah dan keadilan yang tertuang pada akuntabilitas masjid.

Masjid merupakan suatu organisasi tempat berkumpulnya anggota masyarakat dalam melakukan interaksi, membangun suatu hubungan dan kepercayaan (Attouni, dkk. 2014). Masjid tidak berorientasi untuk memperoleh laba. Masjid dibangun oleh suatu komunitas dan masyarakat tertentu sebagai tempat untuk mendapatkan pelayanan, baik pelayanan spiritual maupun material (Sucipto 2014, Payer-Langthaler, dkk. 2013). Kinerja mesjid diukur dari sudut pandang *stakeholder* (Harrison, dkk. 2012), yaitu seberapa baik masjid memberikan pelayanan terhadap jamaah dan masyarakat, bukan dari kemampuan masjid mengumpulkan donasi yang direfleksikan melalui angka-angka moneter (Baker 2014, Gibbon 2012, Najam 2002).

Dalam konteks masjid, performa masjid dilihat dari aktifnya kegiatan masjid yang melibatkan jamaah dan masyarakat (Sucipto, 2014). Menurut Sucipto (2014) masjid akan *sustainable* jika menggunakan konsep "Memakmurkan dan

Dimakmurkan Masjid". Konsep ini memiliki makna bahwa kemakmuran masjid tidak akan tercapai melalui hubungan satu arah dari pengurus kepada masyarakat saja. Jadi, kunci dari kemakmuran masjid ditandai dengan adanya hubungan dua arah antara pengurus dan masyarakat. Dengan kata lain, kemakmuran masjid dan kemakmuran masyarakat harus berjalan secara berdampingan.

Hasil penelitian Siskawati, dkk (2016) yang bertujuan untuk menggali praktik akuntabilitas pada masjid menemukan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama yang dipegang teguh oleh pengurus dalam menjalankan kegiatan dan program-program masjid. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pengurus masjid selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah dan keadilan yang ada pada dirinya. Disamping itu, kemakmuran masjid tidak terlepas dari peran serta partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dapat ditingkatkan melalui rasa memiliki terhadap masjid serta rasa persatuan dan kesatuan, sehingga sangat dibutuhkan suatu upaya dari pengurus untuk menghindari perpecahan baik antar sesama jamaah maupun antara jamaah dan pengurus. Jika masyarakat dapat diberdayakan oleh masjid dalam upaya memakmurkan masjid, maka dengan sendirinya masjid telah memakmurkan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi akuntabilitas dari perspektif nilai-nilai islam yang tertuang pada akuntabilitas masjid. Masjid yang dijadikan sebagai situs penelitian adalah masjid Jogokariyan yang berada di Kampung Jogokariyan atau tepatnya di Jalan Jogokariyan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Alasan menggunakan Masjid Jogokariyan karena menurut sumber pustaka

baik dari media online dan hasil penelitian Pramesvari (2019) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan masjid Jogokariyan pada aspek mental yang diukur dengan ketercapaian program menggunakan indikator akuntabilitas menurut Ellwood yaitu akuntabilitas hukum & kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan telah terpenuhi dengan tercapainya program-program sesuai aturan yang ada. Laporan setiap program dimuat di buletin masjid yang diterbitkan di Idul Fitri dan Idul Adha. Pertanggungjawaban pengelolaan masjid pada aspek fisik memang belum sepenuhnya terpenuhi. Takmir tidak mengenal PSAK 45 maupun PSAK 109. Bendahara sebatas mencatat arus kas masuk dan kas keluar saja, meskipun sudah sangat jelas dan transparan. Tercapainya program-program masjid juga didukung dengan tercapainya pertanggungjawaban pengelolaan masjid pada aspek spiritual. Takmir dengan sepenuh hati semata-mata karena Allah melayani jamaah. Mereka bekerja tidak mengharapkan imbalan apapun di dunia melainkan mendapat imbalan berupa pahala dari Allah SWT. Ketiga aspek sangatlah penting, kinerja mental dapat tercapai ketika adanya keseimbangan antara kinerja fisik dan kinerja spiritual.

Lebih lanjut, masjid ini dipilih karena masjid ini merupakan masjid dengan kegiatan kemasyarakatan yang aktif. Ada 28 divisi yang bekerja di antaranya biro klinik, biro kaut, dan komite aksi untuk umat. Banyaknya kegiatan yang berjalan di masjid Jogokariyan membuat masjid ini tak pernah sepi. Meski di luar Bulan Ramadan, jamaah shalatnya selalu ramai. Hal ini menarik perhatian masyarakat muslim tak hanya di luar Yogyakarta tapi juga luar negeri. Hal ini berdasarkan pernyataan salah seorang pengurus masjid yang dilansir dalam media online detik.com, pengurus masjid menyatakan bahwa “banyak yang studi banding d

masjid ini. Beberapa tahun lalu, parlemen Eropa ke sini. Pernah juga ulama Palestina berkunjung".

Hal unik lain yang ada pada masjid Jogokariyan adalah program Gerakan Sisa Infak Nol Rupiah. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Jogokariyan sangat berupaya agar saldo infak yang diberikan jamaah habis setiap pekan alias nol rupiah, kecuali apabila ada perencanaan pembangunan atau renovasi tertentu. Para pengurus berpendapat bahwa infak jamaah bukan seharusnya disimpan di dalam rekening, melainkan harus dipergunakan untuk memaslahatan umat agar dapat memiliki nilai guna. Pemanfaatan uang infak pun bermacam-macam, selain untuk operasional masjid, juga digunakan untuk kebutuhan mendesak jamaah atau warga yang tinggal di sekitar masjid. Sebagai misal, apabila ada jamaah yang anaknya perlu membayar uang sekolah, berobat ke rumah sakit, dan lain-lain. Menurut mereka, sangat tidak etis ketika saldo rekening bank masjid menumpuk tetapi disekeliling mereka masih banyak warga yang merasakan kesulitan hidup.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana dekonstruksi model akuntabilitas dari perspektif nilai-nilai islam yang tertuang pada akuntabilitas masjid ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai dari penelitian ini adalah dekonstruksi model akuntabilitas dari perspektif nilai-nilai islam yang tertuang pada akuntabilitas masjid. Dekonstruksi adalah model pemahaman yang dikembangkan oleh Jacques Derrida. Dekonstruksi adalah model analisis yang

berkaitan dengan "pembongkaran" atau "pencairan" terhadap berbagai struktur (bahasa, kekuasaan, institusi, objek sosial) untuk mengatasi berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dalam rangka memulai sebuah permulaan baru, tanpa perlu melakukan penghancuran (*destruction*) dari elemen-elemen yang sudah ada (Handayani, 2006). Dekonstruksi bermain dalam tataran refleksi dengan cara menunda kebenaran dan menggali makna-makna baru dari sebuah pengalaman. Hasilnya bukan sebuah kesimpulan, dekonstruksi tidak menawarkan kesimpulan dan kepastian apapun, kecuali data berupa makna baru yang harus ditanggapi secara bebas.

Secara ringkas, penelitian ini bertujuan mengkaji makna akuntabilitas bagi takmir masjid Jogokariyan hingga menghasilkan sebuah konsep, dan kemudian mencoba untuk mendekonstruksi akuntabilitas konvensional melalui perspektif akuntabilitas masjid.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap peneliti sejatinya memiliki harapan bahwa hasil penelitiannya kelak akan berguna untuk sesama. Maka dari itu, dalam penelitian ini tertoreh pula harapan, semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya baik secara teoritis maupun secara praktis.

Hasil dari penelitian ini memberikan beberapa manfaat secara teoritis, yaitu:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dari segi pemikiran terhadap perkembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam pemahaman mengenai akuntabilitas.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran tentang dekonstruksi akuntabilitas yang dibangun dari perspektif nilai-

nilai Islam yang tertuang pada akuntabilitas masjid.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang persepsi akuntabilitas yang merujuk pada akuntabilitas masjid yang terlahir dari fenomena budaya dalam masyarakat seperti mengedepankan kepercayaan masyarakat yang diterapkan para pengurus masjid dalam mengimplementasikan akuntabilitas.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan andil dalam memperkaya beberapa hasil penelitian mengenai akuntabilitas. Merujuk dari apa yang telah dikemukakan oleh Amaliah (2014), ilmu pengetahuan yang dibangun dan dikembangkan selama ini tidaklah diperuntukkan hanya untuk mengungkapkan realitas yang ada serta mencari kebenaran dari realitas tersebut. Namun lebih dari itu, pengembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya juga diarahkan pada penciptaan nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan manusia dalam menjalani kehidupannya.
5. Bisikan dari relung naluri sangat mengharapkan manfaat dari hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran serta membuka hati dan pikiran bahwa akuntabilitas tidak hanya merupakan amanah yang harus bertanggungjawab kepada pemegang saham tetapi tetap bertanggungjawab pada *stakeholder, shareholder, creditor, social*, dan lingkungan yang berujung pada ketundukan Illahi.

Hasil dari penelitian ini memberikan beberapa manfaat secara praktis, antara lain:

1. Untuk diri pribadi, penelitian ini sangat bermanfaat sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar magister akuntansi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan setetes wawasan tentang makna lain akuntabilitas yang diimplementasikan oleh para pengurus masjid.
3. Bagi para pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang ini, diharapkan penelitian ini dapat berevolusi menjadi motivasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Suatu Tinjauan Literasi tentang Dekonstruksi

Dekonstruksi merupakan salah satu aliran filsafat posmodern yang dikembangkan oleh Jacques Derrida, seorang Yahudi Aljazair yang menjadi kritikus sastra dan seorang filsuf di Perancis. Derrida menarik kesimpulan, bahwa selalu ada suatu realitas yang bersembunyi di belakang tanda; selalu ada sesuatu yang tersembunyi di balik apa yang hadir. Ia adalah realitas dan hubungan dalam realitas, dan dua hal itulah yang merupakan titik sentral kajian Derrida. Ketika realitas dan hubungan dalam realitas itu muncul dalam penerapan, yaitu dekonstruksi (Mulawarman, 2013).

Lebih lanjut Istanto (2003) memaparkan bahwa dekonstruksi hadir dengan latar-belakang posmodernisme yang berdasarkan pemikiran filsafat bahwa susunan pemikiran yang begitu terpadu, yang tersusun rapi, kini dipilah-pilah sampai ke dasar-dasarnya. Kehadiran dekonstruksi dilihat sebagai bagian dari posmodernisme yang secara epistemologi atau filsafat pengetahuan, harus menerima suatu kenyataan bahwa manusia tidak boleh terpaku pada suatu sistem pemikiran yang begitu ketat dan kaku.

Adapun pengertian dari dekonstruksi menurut Triyuwono (2012:139) adalah upaya menghadirkan aspek-aspek lain yang berada di luar narasi besar (logosentrisme, dalam hal ini pemikiran sistem ekonomi dan akuntansi modern). Hal ini juga senada dengan pernyataan O'Donnell (2009:63) yang berpendapat bahwa dekonstruksi membuka tabir kemungkinan makna yang begitu banyak, agenda terselubung dan aspek yang tidak disadari dari teks. Dengan demikian dekonstruksi digunakan sebagai strategi baru untuk memeriksa sejauh mana

struktur-struktur yang terbentuk dan senantiasa dimapankan batas-batasnya serta ditunggalkan pengertiannya. Hal-hal terkait batas-batas penunggalan inilah yang hendak disubversi Derrida dengan strategi dekonstruksi.

Jacques Derrida di dalam *Writing and Difference* yang dikutip dalam buku Damayanti (2018: 73) menggambarkan sebuah dunia tanda dan dunia teks yang dilepaskan dari berbagai fondasi kebenaran, dalam rangka menciptakan kondisi tekstualitas atau pertanda yang dinamis atau produktif. Bagi Derrida, dunia penuh ketidakpastian sehingga tidak perlu ditentukan sebuah kebenaran. Ketidakpastian harus dirayakan dan digali lebih dalam makna-maknanya. Manusia berhak menafsirkan konteks kehidupannya secara bebas, guna menemukan makna baru sebagai alat untuk berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah.

Untuk merealisasikan gagasannya sekaligus kritiknya atas modernitas, Derrida mengungkapkannya dalam metode dekonstruksi dan uraian tentang “*difference*” (O’Donnel 2009:56-57). *Differance* adalah suatu “kata dalam kata” dalam bahasa Perancis, tapi tidak ada dalam kamus. Kata itu dibentuk sendiri oleh Derrida kata *difference* (dalam bahasa Inggris) yang berarti perbedaan dan kata *differer* (dari bahasa Inggris: *differ*). Kata *differer* ini memiliki dua arti, yang pertama sebagai kata kerja intransitif yang artinya berbeda atau bertolak belakang, sama dengan arti kata *difference*. Yang kedua sebagai kata kerja transitif, mempunyai arti menunda, menangguhkan atau mengundurkan waktu. Kata *differance* menggabungkan kedua kata asal tersebut sehingga memiliki makna yang mengacu pada adanya perbedaan dan penangguhan waktu. Namun dalam bahasa Perancis pengucapan *differance* (dengan huruf a) tidak berbeda

dengan pengucapan kata *différance*. Derrida memperbandingkan huruf a yang diam ini serupa dengan diamnya makam Fir'aun, yaitu Piramid di Mesir.

Konsep *différance* digunakan untuk melihat tanda-tanda, artinya maknanya suatu tanda dimungkinkan karena setiap tanda berbeda dengan semua tanda lainnya dalam sistem tanda bersangkutan. Konsep ini sejajar dengan pendapat aliran linguistik struktural yang menganggap *the language is a difference methode of meaning*. Dengan konsep *différance* proses dekonstruksi merupakan suatu proses mendiferensiasikan atau produksi perbedaan-perbedaan yang merupakan syarat timbulnya setiap makna dan sistem struktur. Menurut Derrida, kata atau tanda kini tidak mampu lagi menghadirkan makna sesuatu yang dimaksud secara serta-merta. Istanto (2003), makna harus dicari dalam rangkaian tanda yang lain yang mendahului tanda yang pertama. Sifat mendiferensiasi tidak cukup bagi suatu tanda, realitas makna juga harus dicari dalam tanda-tanda lain yang mendahului dan saling terkait (*tissue of sign*) yang mungkin hanya nampak jejak-jejaknya saja (*traces*).

Derrida sering menitikberatkan pada hal yang kecil. Ketika misalnya hikayat diceritakan dalam teks, hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang kemudian perlu dipertimbangkan kembali adalah makna lanjutan dekonstruksi dari Derrida, mengenai dekonstruksi yang tidak pernah diarahkan pada kepastian kebenaran dan akan terjadi dekonstruksi terus menerus. Tetapi dekonstruksi tidak pernah diarahkan pada kepastian kebenaran. Ia mendekonstruksi agar dapat mendekonstruksi lagi dan lagi secara terus menerus; bukan berarti menghancurkan yang paling bawah, untuk menemukan kebenaran. Walaupun dekonstruksi berjalan terus, ia hanya akan memberi jalan pada dekonstruksi selanjutnya (Mulawarman, 2013).

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu makna bahwa tidak akan menghilangkan makna bangunan lama yang sudah ada (dalam hal ini penulis tidak meniadakan makna akuntabilitas konvensional yang sarat akan unsur kapitalisme, egoistik dan materialisme), namun memunculkan makna akuntabilitas dengan perspektif akuntabilitas masjid.

2.2 Telaah tentang Nilai-nilai Islam

Islam berasal dari kata *aslama yuslimu* yang berarti menyerah, tunduk, dan damai. Secara bahasa, Islam mengandung makna umum, bukan hanya nama dari sebuah agama. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan merupakan makna Islam yang berarti bahwa segala sesuatu yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT adalah Islam. Islam mengatur semua aspek kehidupan secara jelas, dan sistematis yang menekankan pada nilai dan implementasinya (Rafiki, dkk. 2014:1). Etika dalam Islam didefinisikan sebagai prinsip dan nilai yang baik yang bersumber pada Islam (Al-Aidaros, dkk. 2013:12).

Islam hadir dengan ajaran yang menjanjikan kemashlahatan dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab suci universal berlaku untuk setiap lapisan generasi tanpa terkekang oleh ruang dan waktu yang menuntun manusia kejalan yang benar. Al-Quran diturunkan adalah sebagai kitab petunjuk yang meliputi bidang akidah, syariah dan akhlak. Kandungan Al-Quran adalah bukti nyata tak teragukan untuk seluruh cakupan umat manusia kapan saja maupun dimana saja sejalan tidak akan pernah berakhir selama manusia hadir dimuka bumi. Dengan asma-asma Al-Quran sebagai penjelas dan pembeda menunjukkan manusia segala sesuatu yang *haq* diantara kebathilan sebagai petunjuk kehidupan.

Meskipun Islam tidak memberikan sebuah teori komprehensif di bidang akuntansi, namun tetap menyediakan seperangkat pedoman umum yang dapat

diterapkan untuk mencapai tujuan mendasar dari manajemen yang tidak mendasar pada materialis (Abuznaid, 2006). Islam memberikan pemahaman paling komprehensif dari kepemimpinan melalui sistem etika yang sangat maju dan modern yang berpedoman dari Al Qur'an, Sunnah, dan perkataan Nabi Muhammad SAW (Billah, 2011).

Akuntansi menurut perspektif Islam adalah semua tentang norma-norma positif dan membawa nilai-nilai keTuhanan (*self-transendent*) dalam kehidupan sehari-hari, mencari kehendak Allah dan mengikuti perintahnya dalam bentuk Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan akuntansi dan manajemen Islam bukan hanya duniawi dan yang berorientasi uang, tapi berusaha untuk mencari hadiah intrinsik jangka panjang, keberkahan Allah (Ahmed, 2012). Islam memegang semua pemimpin dan pengikut bertanggung jawab untuk membangun masyarakat dan untuk menyebarkan aturan Allah di muka bumi². Kedua belah pihak sama di mata Allah dan karenanya harus melakukan peran terbesar mereka dengan integritas dan dedikasi.

Akuntabilitas memiliki tujuan ekonomi dan sosial, namun akuntabilitas Islam memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan ekonomi, politik, keagamaan dan sosial (Presetio, 2017).. Artinya akuntabilitas menurut hukum ilahi Islam adalah cara untuk sumber kehidupan yang dalam pengertian teknis merujuk kepada sistem hukum sesuai dengan Al Qur'an dan hadist. Al-Qur'an dan sunah mendefinisikan dengan jelas apa yang benar, jujur dan adil, apa yang menjadi preferensi prioritas masyarakat, apa peran dan tanggung jawab perusahaan, dan juga, dalam beberapa aspek, menguraikan standar akuntansi khusus untuk praktik akuntansi.

Manusia sebagai wakil Allah dimuka bumi (*khalifatullah fil 'ardh*), dituntut untuk mengelola bumi dan sumber daya yang melekat didalamnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga, manusia berkewajiban untuk menyebarkan rahmat (kekayaan, wealth) kepada seluruh makhluk (*rahmatan lil 'alamin*) dengan cara- cara *amr ma'ruf nahi munkar*, berkeadilan dan sesuai dengan akal serta hati nurani yang dimilikinya. Allah telah mempertegas kedudukan manusia tersebut dalam Al-Qur'an Surah Shad ayat 26, yang artinya:

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. 38 : 26)

Umat Islam tidak hanya mengkaji Al-Quran dari sudut pandang normatif yang mengandung nilai-nilai keislaman sejati, tapi diterjemahkan pada tatanan praktik sehingga menjadi nyata dalam dunia empiris. Turunan itu melibatkan tatanan mikro dan makro dalam kehidupan. Ayat tersebut mampu memberikan motivasi terkini menciptakan budaya akuntansi tekhusus pada penerapan akuntabilitas.

Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, bersifat universal, fleksibel, berlaku tiap zaman dan mampu secara mutlak untuk memahami segala perubahan zaman, dan perkembangan kehidupan, maupun pandangan manusia itu sendiri terhadap kehidupan ini dan segala kondisi yang melingkupinya. Universalitas ajaran Islam menunjukkan adanya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, karena Dia (Allah) adalah rahmat. keadilan dan kemanusiaan. Dia (Allah) adalah risalah yang memberi

batas kepada setiap aturan, misi kemanusiaan, dan aturan buatan manusia yang tersebar di muka bumi (Alamsyah, 2008).

Universalitas ajaran Islam, dimulai dari akidah *syahadatain* yang merupakan inti ajaran tauhid. Ajaran ini mengakui tentang ke-Esa-an Allah sebagai sang Pencipta, Tuhan Seru sekalian alam dan Rosulullah sebagai utusan-Nya, sebagai pihak yang harus diteladani sikapnya dalam kehidupan. Ini berarti, bahwa konsep akidah yang demikian harus diterapkan dalam potret nyata ibadah kepada Allah SWT. Konsep ibadah dan akidah yang demikian, mengatur seluruh kehidupan seorang muslim selama 24 jam, tanpa membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum termasuk didalamnya adalah dunia bisnis.

Dalam dunia bisnis, status keuangan menjadi tolak ukur pasti dalam mengatur perusahaan dan teori akuntansi terkhusus pada penerapan akuntabilitas dikembangkan berdasarkan asas prinsip dan asumsi. Standar perilaku menjadi dasar penilaian benar atau salahnya, amanah atau tidak amanahnya, jujur atau tidak jujurnya, adil atau tidak adilnya seseorang, adalah etika. Akuntansi yang direfleksikan bersandar pada nilai-nilai Islam tidak akan bertentangan dengan syariat. Jadi laporan keuangan terdorong mencapai kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan menghilangkan eksploitasi segala bentuk kedholiman. Bangunan akuntansi berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah dan Fatwa Syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berhak mengatur ketentuan akuntansi supaya tidak bertentangan dengan Nilai Islam.

Amanah dalam konteks praktek akuntansi, diinterpretasikan sebagai akuntabilitas, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang amanah harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, pelaksana, masyarakat dan

Tuhan. Pertanggungjawaban kepada Tuhan berkaitan dengan sifat amanah. Amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh insan kehidupan, perilaku ini juga merupakan pengajaran tertinggi di dalam Islam. Hal ini selaras dengan pernyataan Mulawarman (2010), akuntansi profesional yang seutuhnya adalah mereka yang mampu mengembangkan gagasan, teori, konsep, maupun aplikasi akuntansi sesuai dengan realitas dan tetap berorientasi pada empati akuntabilitas pada *stakeholder*, *shareholder*, kreditor, sosial, dan lingkungan yang berujung pada ketundukan Ilahi.

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan Amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Muddasir: 38:

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S.: Al-Muddasir: 38).46*

Kemudian diperkuat dalam firman Allah Q.S An Nisa': 58:

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". Q.S An-Nisa ayat 58*

Menurut Kholmi (2012) ayat di atas menjelaskan dua kewajiban manusia sebagai pemimpin yaitu; *Pertama*, memberikan amanah kepada yang berhak yaitu ditujukan kepada mereka yang mendapatkan kepercayaan dan orang yang memegang urusan mengatur hak-hak manusia. *Kedua*, memberikan keputusan hukum antara manusia dengan adil atau menyampaikan kebenaran kepada

pemilikinya, serta menanggulangi orang yang merampas hak itu dan merebut darinya untuk diberikan kepada yang berhak.

Nilai-nilai Islam lebih dalam menekankan pada kepentingan pertanggung jawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi atau kegiatan ekonomi perusahaan tidak dirugikan dan tidak menimbulkan konflik. Lebih lanjut kalau kita sampai kepada pembahasan, bahwa manusia diciptakan Allah dimuka bumi ini memiliki fungsi dan peran ganda, yaitu: fungsi *khalifah* dan *Abdullah* (wakil dan hamba). Didalam menjalankan fungsi dan peran ini tentu saja pemberi peran akan meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan fungsi tersebut. Oleh karena itu, kehidupan manusia sebagai khalifah dan Abdullah tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses akuntansi. Dengan kata lain, manusia akan selalu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan amalannya dihadapan sang pemberi amanah yaitu Allah SWT.

Itulah mengapa nilai-nilai Islam diperlukan dalam penerapan akuntabilitas, sebab nilai-nilai Islam merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keteguhan amanah dan keadilan dalam masyarakat. Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an Surah Asysyuraa' 182-183 dan ayat Al-Qur'an Surah An Nahl ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”(Q.S. 42: 182-183)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”(Q.S. 16: 90)

Penggunaan nilai-nilai Islam pada akuntabilitas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah ayat-ayat di atas. Karena nilai-nilai Islam terkhusus nilai amanah dan keadilan dapat menjaga agar *asset* yang dikelola terjaga akuntabilitasnya sehingga tidak ada yang dirugikan, lurus, amanah, adil, dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya.

Hakekat nilai keadilan dalam Nilai-nilai Islam berdasarkan aksioma, bahwa manusia adalah *khalifatullah fil ardh*. Hal ini mengandung pengertian, bahwa manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dituntut untuk mampu mendistribusikan rahmat kepada seluruh makhluk yang ada. Pendistribusian tersebut tentu saja harus dilakukan dengan cara-cara yang adil (lihat Q.S. An-Nahl ayat 90 di atas) berdasarkan atas potensi internal (akal dan hati nurani) yang dimilikinya. Tidak hanya itu saja, pendistribusian rahmat ini diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan mampu melakukan suatu perubahan ke kondisi yang lebih baik bagi seluruh umat (stakeholders), alam dan lingkungan.

Dalam suatu perusahaan, untuk mewujudkan suatu keadilan dapat dilakukan dengan cara: pertama, memberikan kesempatan yang sama kepada para stakeholders dalam penggunaan sumber daya yang ada. Kedua, memberikan kesempatan kepada para stakeholders untuk mendapatkan informasi. Ketiga, memberikan kesamaan hak kepada stakeholders untuk menikmati laba sebagai hasil dari pengolahan sumberdaya (Slamet, 2001: 233).

Kondisi ini akan dapat tercapai, jika setiap anggota partisipan yang ikut berperan serta dalam penciptaan kekayaan baik langsung maupun tidak langsung, menerima hak mereka sesuai dengan kontribusi mereka secara adil. Dengan demikian keadilan dalam syariah Islam bukan merupakan keadilan buta

yang membagi segalanya menjadi sama rata, tetapi keadilan yang dilandasi oleh pemenuhan hak berdasarkan atas kontribusi yang diberikan.

Konsep yang terbentuk dalam akuntansi Islam merupakan relevansi seluruh prinsip serta asumsi nilai-nilai Islam. Tidak keluar dari hal-hal tersebut konsep akuntansi mengarah pada unsur amanah, keadilan, kebenaran, transparansi. Tujuan ini agar menciptakan informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat memengaruhi perilaku para pengguna (users) informasi akuntansi kearah terbentuknya peradaban ideal.

2.3 Kerangka Pikir

Berbagai penelitian telah menunjukkan keterbatasan akuntansi konvensional (Reheul, dkk. 2014; Vermeer, dkk. 2009). Hal ini ditunjukkan dari banyaknya skandal akuntansi dan manipulasi laporan keuangan yang melanda perusahaan serta rendahnya kepedulian mereka akan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Sulistiyo, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi telah gagal untuk menggambarkan realitas bisnis secara utuh. Triyuwono (2006) menyatakan bahwa akuntansi konvensional tidak mampu merefleksikan realitas non ekonomi yang diciptakan perusahaan. Ia hanya mampu mengakui dan merefleksikan peristiwa ekonomi saja. Hal ini selaras dengan pernyataan Prasetio (2017) bahwa di dalam akuntansi konvensional (*mainstream accounting*), pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders* dan *bondholders* sedangkan pihak yang lain sering diabaikan.

Triwuyono (2006) kembali menyatakan bahwa salah satu kelemahan mendasar akuntansi konvensional terletak pada sifatnya yang egoistik dan materialistik. Secara sistematis, (Triyuwono, 2006) menjelaskan beberapa kelemahan yang muncul berkaitan dengan praktik akuntansi konvensional yakni :

1) Akuntansi konvensional mengabaikan dua aspek penting yaitu lingkungan dan sosial sehingga gagal menggambarkan realitas bisnis yang semakin kompleks. 2) Sifat egoisme sangat melekat pada akuntansi konvensional sehingga terefleksi ke dalam bentuk *private costs/benefits* dan berorientasi melaporkan *profit* untuk kepentingan pemilik modal/pemegang saham. Oleh karena itu informasi akuntansi menjadi egois dan mengabaikan pihak lain. 3) Akuntansi modern lebih bersifat materialistik sehingga memarjinalkan nilai-nilai spiritualitas padahal manusia sebagai pelaku akuntansi memiliki dua hal tersebut yakni material dan spiritual. Jika manusia diarahkan untuk menjalankan praktik akuntansi yang berorientasi pada materi (*profit*) maka perilaku yang muncul berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut berpotensi melanggar aturan dan kehilangan nilai-nilai etika, agama dan moralitas.

Sifat egoistik dan materialistik diekspresikan dengan jelas oleh Triyuwono (2006) pada laporan keuangan (*financial statement*). Contoh sederhana adalah laporan laba-rugi (*income statement*) yang menyajikan besarnya laba atau rugi perusahaan. Laporan ini menunjukkan akomodasi akuntansi konvensional terhadap kepentingan (ego) *shareholders* untuk mendapatkan informasi besarnya laba yang menjadi haknya. Laba yang dimaksud di sini adalah laba materi yang terukur dengan jelas dengan menggunakan unit moneter.

Menurut teori kritis, akuntansi harus didasarkan pada prinsip demokrasi dan akuntabilitas (Gray et al., 1996). Artinya, organisasi harus menyediakan akuntabilitas tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga untuk berbagai pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh kegiatan organisasi (Gray et al., 1996).

Salah satu *concern* persoalan akuntabilitas adalah dari mana hal ini diturunkan yang tentu saja pada akhirnya memiliki konsekuensi terhadap peradaban karena ketika sebuah praktik langgeng, maka terbentuklah diskursus-diskursus akuntansi dan pada akhirnya membentuk realitas pula. Materialisme sudah merupakan “gen” *economic rationality* (Lehman 2005). *Economic rationality* lebih menekankan pada sisi materialism serta keuntungan yang berasal *western materialist phylosophy*. Ciri dari filsafat materialisme ini adalah penekanan pada sisi material, begitu pula halnya pada *economic rationality* yang memiliki sifat yang demikian. Sisi persaingan, egoisme serta rasionalisme yang berlebihan merupakan sisi *economic rationality*, (Kusdewanti, dkk. 2016). Implikasi nilai pada akhirnya masuk pada tataran realitas praktik, termasuk akuntabilitas konvensional.

Dalam praktiknya, akuntabilitas konvensional telah menghilangkan makna sesungguhnya sebagai manifestasi pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah. Konsep akuntabilitas dalam dunia kapitalisme telah sarat dimasuki nilai-nilai rasionalitas. Dunia kapitalisme mengalami krisis manajemen karena setiap hari terdapat skandal perusahaan, di mana para pemimpin mengkhianati rakyat mereka sendiri dan berusaha untuk mencari keuntungan duniawi. CEO melakukan langkah-langkah untuk mencapai target maksimisasi keuntungan serta memuaskan para pemegang saham. CEO telah melupakan hubungan manusia dan sosial, yang memperoleh kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan (Ahmed, 2012).

Pemecahan atas masalah di atas adalah sebuah keniscayaan ketika nilai-nilai Islam benar-benar menjadi sebuah paradigma dalam penerapan konsep akuntabilitas. Islam hadir dengan ajaran yang menjanjikan kemashlahatan dunia

dan akhirat. Ajarannya mencakup semua tuntunan luhur bagi kehidupan manusia di muka bumi dalam semua bidang kehidupan. Tujuan Islam tidak lain agar manusia selamat dan bahagia dalam kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Dan kepercayaan atas Islam bahwasannya Islam menjanjikan harapan hidup yang lebih baik kepada semua manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, dan gender. Islam adalah sistem nilai dan tata cara dan praktek hidup (Syahra, dkk., 2014). Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Nilai-nilai ini memasuki semua aspek kehidupan baik politik, pertahana, sosial, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya termasuk didalamnya ilmu Akuntansi.

Armadayanti (2017) menyebutkan akuntabilitas sebagai kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban kepada Tuhan berkaitan dengan sifat amanah. Amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh insan kehidupan, amanah juga merupakan pengajaran tertinggi di dalam Islam.

Amanah dalam konteks praktek akuntansi, diinterpretasikan sebagai akuntabilitas, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang amanah harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, pelaksana, masyarakat dan Tuhan. Hal ini selaras dengan pernyataan Mulawarman (2010), akuntansi profesional yang seutuhnya adalah mereka yang mampu mengembangkan gagasan, teori, konsep, maupun aplikasi akuntansi sesuai dengan realitas dan tetap beorientasi pada empati akuntabilitas pada *stakeholder, shareholder,*

creditor, social, dan lingkungan yang berujung pada ketundukan Ilahi.

Nilai-nilai Islam yang juga melekat dengan akuntabilitas adalah nilai keadilan. Berdasarkan prinsip etika dalam Islam, akuntansi memerlukan suatu keadilan dan kejujuran dalam tanggung jawab perusahaan. Triyuwono (2000) berpendapat bahwa nilai keadilan tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi ia juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Ini artinya adalah bahwa manusia, dengan fitrah kemanusiaannya, mempunyai kapasitas internal untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dengan nilai keadilan, akuntansi tak lagi menghamba kepada kepentingan pemilik modal saja.

Di dalam syariah Islam mengharuskan manusia (perusahaan) dalam menyebarkan rahmat (*asset*) tidak boleh hanya berfokus pada pihak-pihak yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada penciptaan kekayaan tersebut, (Wulandari, 2010). Penyebaran rahmat (*asset*) tersebut tentu saja harus dilakukan dengan disertai nilai keadilan berdasarkan potensi internal (akal dan hati nurani). Tidak hanya itu saja, pendistribusian rahmat ini diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan mampu melakukan suatu perubahan ke kondisi yang lebih baik lagi bagi seluruh umat (*stakeholders*), alam dan lingkungan yang berujung pada ketundukan Ilahi.

Penerapan nilai-nilai Islam ini dapat kita temui pada akuntabilitas masjid. Hasil penelitian Siskawati, dkk (2016) yang bertujuan untuk menggali praktik akuntabilitas pada masjid menemukan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama yang dipegang teguh oleh pengurus dalam menjalankan kegiatan dan program-program masjid. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pengurus masjid selalu menjunjung tinggi nilai-nilai

Islam yang ada pada dirinya.

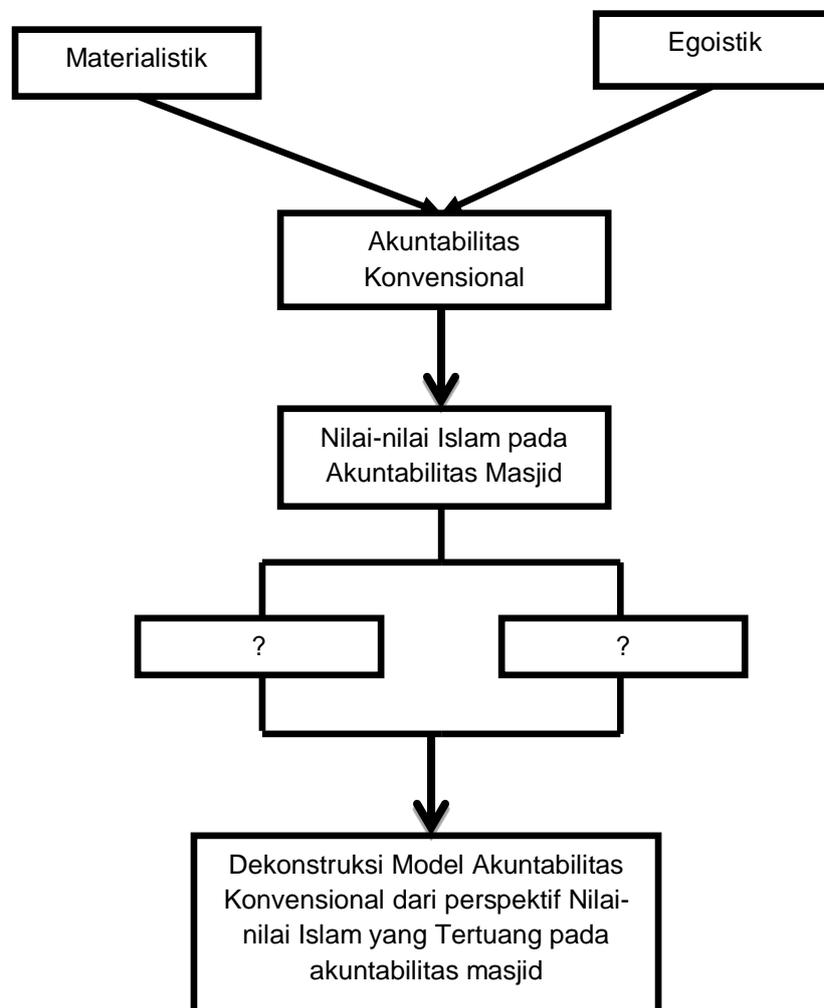
Islam hadir dengan ajaran yang menjanjikan kemashlahatan dunia dan akhirat. Artinya, akuntabilitas konvensional yang berlaku dengan sistem kapitalis yang sarat akan nilai egoistik dan materialistik akan mengalami penyucian jiwa jika nilai-nilai Islam diterapkan dalam akuntabilitas. Dengan demikian, dekonstruksi ala Derrida telah menjadi salah satu solusi untuk meruntuhkan struktur mapan yang menyengsarakan (Rusbiantoro, 2001: 23).

Adapun pengertian dari dekonstruksi menurut Triuwono (2012:139) adalah upaya menghadirkan aspek-aspek lain yang berada di luar narasi besar (logosentrisme, dalam hal ini pemikiran sistem ekonomi dan akuntansi modern). Akuntansi digambarkan oleh Triuwono (2006) bahwa posmodernisme sebagai alat untuk melakukan dekonstruksi pengetahuan akuntansi yang sarat nilai modernisme yang memperangkap lokalitas dan agama dalam konteks harmonisasinya dengan akuntansi yang tunggal. Akuntansi sebenarnya bukanlah produk yang memiliki kesamaan secara sosiologis, kultural bahkan filosofis. Triuwono (2000) bahkan membuktikan bahwa ternyata akuntansi tidaklah tunggal. Hal ini juga senada dengan pernyataan O'Donnell (2009:63) yang berpendapat bahwa dekonstruksi membuka tabir kemungkinan makna yang begitu banyak, agenda terselubung dan aspek yang tidak disadari dari teks. Dengan demikian dekonstruksi digunakan sebagai strategi baru untuk memeriksa sejauh mana struktur-struktur yang terbentuk dan senantiasa dimampakan batas-batasnya serta ditunggalakan pengertiannya.

Melihat pengertian dekonstruksi di atas, dapat diambil suatu makna bahwa penulis tidak menghilangkan makna bangunan lama yang sudah ada. Dalam hal ini penulis tidak meniadakan makna akuntabilitas konvensional yang sarat akan

nilai egoistik dan materialistik, namun memunculkan makna akuntabilitas dengan perspektif nilai-nilai Islam yaitu amanah dan keadilan yang tertuang pada akuntabilitas masjid.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir



Sumber : Modifikasi Peneliti